

Daftar Pustaka

- , S., Safrida, N., & Muhammad, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Aceh Barat. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2). <https://doi.org/10.31289/publika.v9i2.6027>
- Andersen, J. E. (1975). *Public Policy Making*. Praeger.
- Andersen, J. E. (1984). *Public Policy-Making* (ed. 3). Holt, Rinehart and Winston.
- Barmawi, W., & Suranto, S. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kota Ternate. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(1). <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0055>
- Bashori, B., & Aprima, S. G. (2019). Analisis Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi Lampung. *Produ: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i1.3324>
- Irawati, E., & Susetyo, W. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Blitar. *Jurnal Supremasi*, 7(1). <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i1.374>
- Lidda, M. A. A., Tajuddin, M. S., & Irfan, I. (2022). Implementasi Program Pendidikan Gratis Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Malunda (Smpn4 Malunda) Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. *Mitzal (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 7(1). <https://doi.org/10.35329/mitzal.v7i1.2901>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja. Rosdakarya.
- Nurfadlilah, E. (2017). Tata Kelola Pendidikan : Studi tentang Gerakan Ayo Sekolah di Kabupaten Bojonegoro Ddilihat dari Perspektif Good Governance dan Sound Governance. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–13.
- Pasolong, H. (2014). *Teori Administrasi Publik* (Cetakan 6). Alfabeta.
- Pritasari, L. A., & Kusumasari, B. (2019). Intervensi Aktor dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang di Yogyakarta. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(2).
- Putri, Alfina, & Mus, S. (2021). Implementasi Program Pendidikan Inklusi Di Sd Negeri Unggulan. *Jurnal Administrasi, Kebijakan, Dan Kepemimpinan Pendidikan (JAK2P)*, 2(2). <https://doi.org/10.26858/jak2p.v2i2.13474>
- Putri, Annisa, Jayanti, J., & Fakhrudin, A. (2022). Analisis Implementasi Program Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Di Sdlb Negeri Prabumulih. *Js (Jurnal Sekolah)*, 6(2). <https://doi.org/10.24114/js.v6i2.33373>
- Rahman, A., Mawar, M., Wahyuning Dyas Tuti, R., Handayani, N., & Sahrul, M.

- (2021). Key Determinants of Elementary School Education Policy Implementation in Border Region. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 11(1). <https://doi.org/10.26858/jiap.v11i1.20585>
- ROLOS, M. C., POSUMAH, J., & ... (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Minahasa In ... *ADMINISTRASI PUBLIK*.
- S., G., & Monalisa. (2022). Pengaruh Kebijakan Pemberian Insentif Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2). [https://doi.org/10.25299/jkp.2015.vol1\(2\).9312](https://doi.org/10.25299/jkp.2015.vol1(2).9312)
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D / Sugiyono*. Alfabeta.
- Zurqoni, Retnawati, H., Arlinwibowo, J., & Apino, E. (2018). Strategy and implementation of character education in senior high schools and vocational high schools. *Journal of Social Studies Education Research*, 9(3). <https://doi.org/10.17499/jsser.01008>

Undang-Undang/Peraturan/Dokumen

- Alenia keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Pendidikan
- Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2021
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang Undnag Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penanganan Anaka Tidak Sekolah